

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 dan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang .....

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

18. Peraturan .....

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127).
24. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 129).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I .....

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare dalam Tahun Anggaran 2016.

BAB II

PERATANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

- 1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan arus kas;
  - d. Laporan Operasional
  - e. Laporan Perubahan SAL;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan.
- 2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Pasal 3

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 917.925.913.143,20
b. Belanja	<u>Rp. 986.775.184.897,85</u>
Surplus/deficit	Rp. (68.849.271.754,65)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 162.242.482.101,49
2. Pengeluaran	<u>Rp. 12.242.954.942,74</u>
Surplus/deficit	Rp. 149.999.527.158,75

Pasal 4

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut :

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp 119.577.142.723,61 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran .....

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah Perubahan | Rp. 1.037.503.055.866,81      |
| b. Realisasi                             | <u>Rp. 917.925.913.143,20</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                   | Rp. 119.577.142.723,61        |
2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp 199.797.293.492,15 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah Perubahan | Rp. 1.186.572.478.390,00      |
| b. Realisasi                          | <u>Rp. 986.775.184.897,85</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                | Rp. 199.797.293.492,15        |
3. Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/deficit sejumlah Rp. (80.220.150.768,54) dengan rincian:
- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| a. Surplus/deficit perubahan | Rp. (149.069.422.523,19)       |
| b. Realisasi                 | <u>Rp. (68.849.271.754,65)</u> |
| selisih lebih/(kurang)       | Rp. 80.220.150.768,54          |
4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 29.114.421,70 dengan rincian sebagai berikut :
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp. 162.271.596.523,19        |
| b. Realisasi  | <u>Rp. 162.242.482.101,49</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                              | Rp. 29.114.421,70             |
5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 959.219.057,26 dengan rincian sebagaiberikut :
- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Perubahan | Rp. 13.202.174.000,00        |
| b. Realisasi                      | <u>Rp. 12.242.954.942,74</u> |
| Selisih lebih/(kurang)            | Rp. 959.219.057,26           |
6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah Rp. (930.104.635,56) dengan rincian sebagai berikut :
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan neto setelah Perubahan | Rp. 149.069.422.523,19        |
| b. Realisasi                                  | <u>Rp. 149.999.527.158,75</u> |
| selisih lebih/(kurang)                        | Rp. (930.104.635,56)          |

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah Aset         | Rp. 2.042.554.310.242,58 |
| b. Jumlah Kewajiban    | Rp. 113.984.173.289,95   |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 1.928.570.136.952,63 |

#### Pasal 6

Laporan arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2016             | Rp. 149.101.631.002,36 ;  |
| b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi              | Rp. 251.475.804.105,82;   |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non Keuangan | Rp. (329.802.173.772,47); |
| d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan                  | Rp. (2.765.857.030,74)    |
| e. Arus kas dari aktivitas Non Anggaran                | Rp. 124.442.846,30        |
| f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2016          | Rp. 81.359.248.381,10 ;   |

Pasal 7 .....

## Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 8

- a. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- Lampiran I : Ringkasan laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan Organisasi.
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan Dan Belanja Pembiayaan.
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelola keuangan Negara.
  - Lampiran I.4 : Daftar Piutang Daerah
  - Lampiran I.5 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
  - Lampiran I.6 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan aset tetap daerah.
  - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya.
  - Lampiran I.8 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun berikutnya.
  - Lampiran I.9 : Daftar dana cadangan daerah, dan
  - Lampiran I.10 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi Daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus kas.
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan.

## Pasal 9

Lampiran laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

## Pasal 10

Walikota Parepare menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
Pada tanggal 22 Agustus 2017

**WALIKOTA PAREPARE,**

Ttd

**TAUFAN PAWE**

Diundangkan di Parepare  
Pada tanggal 22 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**

Ttd

**MUSTAFA MAPPANGARA**

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2017 NOMOR 5

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI  
SELATAN NOMOR ( B.HK.HAM.5.113.17/ tanggal 22 Agustus 2017 )